

The Effect of Policy Implementation of Law Number 33 of 2004 concerning Central and Regional Financial Balance on the Performance of the Regional Government of Banten Province

Andi Ahmad Dara

NPM. 198010027

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

Email: andidara@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze and find out how much influence the implementation of the central and regional financial balance policies, either partially or simultaneously, has on the performance of local government development in Banten Province. The population in this study were employees of the Banten Province Government Work Unit from echelon I to echelon IV as many as 888 employees with 90 samples taken by purposive sampling method. Data testing is done by using path analysis. The results show that the X to Y structure is the influence of the policy implementation variable (X) on the performance variable of the Banten Provincial Government (Y) with Path Analysis of 67.9%, and the influence value outside the model is 32.1%, where the value of the multiple correlation coefficient $R = 0.824$, it can be stated that the degree of influence is very close compared to other variables not examined, and in the sub-structures X_1 , X_2 , X_3 , and X_4 to Y, the influence of aspects of policy implementation are aspects of policy content (X_1), information (X_2), support (X_3) and the distribution of potential (X_4) on Government performance of Banten Province (Y) with Path Analysis of 67.9% and the influence value outside the model is 32.1% where the multiple correlation coefficient value $R = 0.824$ can be stated the degree of influence is very close compared to the other variables. Others not investigated.

Keywords: *Policy Implementation, Central and Regional Financial Balance, Performance, Regional Government.*



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kinerja pembangunan pemerintah daerah di Provinsi Banten. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Banten dari eselon I sampai eselon IV sebanyak 888 pegawai dengan 90 sampel yang diambil dengan metode purposive sampling. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur X to Y merupakan pengaruh variabel implementasi kebijakan (X) terhadap variabel kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Y) dengan Path Analysis sebesar 67,9%, dan nilai pengaruh di luar model sebesar 32,1%, dimana nilai koefisien korelasi berganda $R = 0,824$, dapat dinyatakan bahwa derajat pengaruh sangat dekat dibandingkan dengan variabel lain yang tidak diteliti, dan pada sub struktur X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y pengaruh aspek implementasi kebijakan yaitu aspek isi kebijakan (X1), informasi (X2), dukungan (X3) dan sebaran potensi (X4) terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Y) dengan Path Analysis sebesar 67,9% dan nilai pengaruh di luar model sebesar 32,1% dimana nilai koefisien korelasi ganda $R = 0,824$ dapat dinyatakan derajat pengaruhnya sangat dekat dibandingkan dengan variabel lainnya. Lainnya tidak diselidiki. (Lia Muliawaty, 2022)

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kinerja, Pemerintah Daerah.

REFERENCES

1. Arief, I. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 8(2), 109-118.
2. Christia, A M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform Journal*, 15(1).
3. Edward, H. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Salam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, XLII(1).
4. Grindle, M. S., & John W. Thomas, 1980, *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London: John Hopkins University Press.
5. Halim, A. (2009) *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
6. Howlett, M., & M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
7. Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101-119.
8. Lia Muliawaty. (2022). Implementation of Waste Management Policies by the

Main Waste Bank in Realizing the Effectiveness of the Waste Program in the City of Bandung. *resmilitaris*, 1907-1913.

9.

10. Halim, A. (2009). *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah PusatDaerah: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.
11. Kuncoro, M. (2007). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
12. Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *E-Jurnal Unisfat*, 7(2), 129-144.
13. Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. *Jurnal Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah. LAB-ANE FISIF Untirta*, 1(1), 252-258.
14. Makhfudz, M. (2013). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum*, 3(2), 380-407.
15. Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Foresman, and Company.
16. Nugroho, D. R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
17. Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2017). Analisis dan evaluasi dampak dana alokasi khusus terhadap indikator kinerja pembangunan di daerah studi kasus kabupaten-kota 2003-2013. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 62-70.

18. Pradiptyo, R. Suprayitno, B. (2017) Fiscal decentralization and corruption: The facts in regional autonomy in Indonesia. *Journal Advanced Research of Law and Economics*, 8(5), 1458-1468.
19. Psycharis, Y., & Yoi, M. (2015). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(2), 262-280.
20. Putriani, D. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah di Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*, 1(2), 59-66
21. Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 1(3), 538-553.
22. Rompas, J. F., Pati, A. B., & Lengkong, J. P. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
23. Setiawan, B., & Hadi, S. P. (2007). Regional Autonomy and Local Resource Management in Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1), 72-84.
24. Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4(2), 33-51.
25. Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017). The Effect of Local Government Characteristics and Financial Independence on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 19(2), 65-71.
26. Sumardi. (2015). Determinan Efektifitas pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah serta Dampaknya Pada Ekonomi Pertumbuhan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Journal of Rural and Development*, 5(2), 147-165.
27. Sumardjoko, Imam. 2018. Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus serta Implikasinya terhadap Capaian Output. *Jurnal Defis*, III.
28. Suparman, N., Chandra, D., & Sari, A. L. (2019). Bureaucratic Behavior in the Implementation of Capital Expenditure Budget in the Office of Public Works and Spatial Planning of Sumedang Regency. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(1), 99-109.
29. Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
30. Yakub, A., Ghani, A. B. A., & Anwar, M. S. I. (2018). Urgency of political decentralization and regional autonomy in Indonesia: Local perspectives. *Journal of International Studies*, 14, 141-150.